



Judul : Panja Sangat Relevan Jaga Netralitas TNI dan POLRI
Tanggal : Kamis, 23 Nopember 2023
Surat Kabar : Website DPR
Halaman : 9

BPIH 2024 Disepakati Rp93,4 Juta

Perhitungan BPIH pada prinsipnya harus tidak memberatkan jemaah dan memperhatikan kenyamanan pelayanan selama di Tanah Suci.

M IQBAL AL MACHMUDI
m.iqbal@mediaindonesia.com

SETELAH diadakan pembahasan dan negosiasi terkait dengan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1445 Hijriah/2024 Masehi, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama sepakat di angka Rp93.410.286. Jumlah tersebut turun sekitar 12,5% dari usul awal yang diajukan Kemenag sebelumnya Rp105 juta.

"Setelah dirasionalisasi Dirjen Penyelenggaraan Haji

dan Umrah, didapat angka Rp93,4 juta," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Panja BPIH Abdul Wachid dalam rapat kerja di Gedung DPR Senayan, Jakarta, kemarin.

Abdul mengatakan, meski ada penurunan dari Rp105 juta menjadi Rp93,4 juta, kualitas pelayanan haji tahun depan diharapkan tidak ikut menurun, terutama kepada manula. Hal itu dikatakannya dengan berkaca pada pelaksanaan haji tahun ini yang dinilai tidak ramah manula.

Dia menambahkan, kesepa-

katan BPIH antara pemerintah dan legislatif baru akan diputuskan pada 27 November 2023 saat rapat kerja dengan Menteri Agama.

Di sisi lain, anggota Komisi VIII Fraksi NasDem Sri Wulan mengatakan fraksinya masih belum menerima BPIH di angka Rp93,4 juta karena perhitungan yang bisa ditekan dan catatan perihal data yang harus diperbaiki.

"NasDem masih belum terima karena itu hitungan kami di Rp93,2 juta, tapi kami memahami karena sebenarnya jadi bahan koreksi walaupun selisihnya Rp210 ribu, lumayan," ujar Wulan.

Menurut Wulan, distribusi ada di dua pihak, yakni di maskapai dan di Kemenag, yang harus dijelaskan perinciannya

dan beberapa catatan lainnya. "Jadi, untuk sementara memahami dengan catatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan penurunan usul BPIH tersebut dilakukan setelah mendengar pembahasan dan masukan dari Komisi VIII DPR di pertemuan sebelumnya dan merasionalisasi berbagai bagian dari *item* pembiayaan.

Pada raker kemarin awalnya Kemenag mengajukan angka Rp94.385.382,50 atau naik sekitar 5% jika dibandingkan dengan BPIH 2023 sebesar Rp90.050.637,26.

Sempat alot

Kendati sudah diadakan revisi dan angkanya turun, ang-

gota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengatakan jumlah tersebut masih terlalu besar bagi jemaah. Dia mengusulkan BPIH 2024 bisa di angka Rp91,8 juta.

"Harga yang rasional itu Rp91,8 juta dengan asumsi perhitungan biaya asuransi yang dinilai terlalu banyak ambil untung," kata Iskan dalam rapat kerja tersebut.

Dijelaskan, jika ada jemaah meninggal, biaya asuransi Rp25 juta. Tahun lalu yang meninggal sebanyak 773 jemaah maka asuransi yang dibayar Rp19,32 miliar.

"Sehingga asuransi dikatakan untung 30% karena di *item* asuransi banyak permainan perusahaan perantara. Harus hati-hati dan *item* lainnya bisa disisir," ujar dia.

Di kesempatan yang sama anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Maman Imanul Haq mengatakan pihaknya ingin penaikan BPIH hanya 3% sesuai dengan persentase inflasi. Maman menyebutkan beberapa *item* bisa disisir sehingga angka BPIH bisa di kisaran Rp93,5 juta per jemaah. (H-1)